

 <p>DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE</p>	Nomor SOP	420/ 03 /2025
	Tgl Pembuatan	03 JANUARI 2025
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	03 FEBRUARI 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate
Nama SOP	Pelayanan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paud Dan Kesetaraan	
DASAR HUKUM		KUALITAS PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peraturan Presiden RI No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini 5. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Ternate 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Regulasi Administrasi tentang Pelayanan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paud Dan Kesetaraan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki Tulisan yang Rapi dan Jelas 4. Minimal SLTA atau sederajat
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal dan External 2. SOP Pelayanan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paud Dan Kesetaraan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Petunjuk 2. Ruang, Meja, Kursi, 3. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 4. Komputer/Printer/Scanner 5. Jaringan Internet 6. ATK,Lemari Arsip, Filling Kabinet
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Pelayanan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paud Dan Kesetaraan harus didahului rapat koordinasi dan verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi yang sudah dibentuk guna mengetahui persiapan yang dilakukan oleh masyarakat atau desa atau yayasan yang sudah mengusulkan Ijin Pendirian Lembaga.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Menerima Rekomendasi Izin Operasional Lembaga, Kemudian Menyerahkan Ke Dpmpstp - Disimpan sebagai data elektronik dan manual - Laporan Secara Berkala setiap Tahun

**BAGAN ALUR PELAYANAN PENERBITAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAUD DAN KESETARAAN**

AKTIVITAS	PELAKSANA						
	PEMOHON	DPMPT SP	PENGOLAH DATA	KASIE	KABID	SEKRETARIS	KADIS
PENGAJUAN BERKAS PERSYARATAN OLEH PEMOHON							
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS PENGAJUAN, JIKA LENGKAP DIPROSES LEBIH LANJUT	↑						
PEMERIKSAAN KELENGKAPAN BERKAS, JIKA LENGKAP DIPROSES LEBIH LANJUT							
MENELITI BERKAS PENGAJUAN REKOMENDASI							
VISITASI LAPANGAN							
MEMPROSES SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA							
MENGOREKSI REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL LEMBAGA, MENANDATANGANI KOLOM PENGESAHAN DAN DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA BIDANG UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN							
MENELITI BERKAS DAN SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL, JIKA SETUJU DITANDATANGANI PADA KOLOM PENGESAHAN DAN DIPROSES LEBIH LANJUT							



PELAYANAN GRATIS TIDAK DIPUNGUT BIAYA

PROSES PALING LAMBAT 1 SD 3 HAR

a. Latar Belakang

Pelaksanaan pemberian Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paud Dan Kesetaraan Kota Ternate berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu pemohon mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan Kota Ternate dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. Dinas Pendidikan Kota Ternate menelaah permohonan dan hasil telaahan tersebut berupa rekomendasi kepada DPMPTSP Kota Ternate .Kepala DPMPTSP Kota Ternate menerbitkan keputusan izin Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paud Dan Kesetaraan Setelah semua verifikasi selesai, pihak DPMPTSP Kota Ternate akan mengeluarkan izin operasional untuk PAUD bersangkutan dengan memberikan nomor izin opearsonal

b. Maksud dan Tujuan

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses pembuatan dan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paud Dan Kesetaraan
2. Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan proses pembuatan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paud Dan Kesetaraan dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Ternate
3. untuk melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar PAUD.

4. Dengan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Paud Dan Kesetaraan akan diakui dan didaftar oleh pemerintah sehingga jika ada bantuan dana untuk lembaga PAUD, lembaga tersebut dapat dengan mudah menerima bantuan karena persyaratan yang lengkap
5. Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
6. Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas;

c. Ruang Lingkup

1. Pengagendaaan
2. Pemrosesan
3. Koneksi dan Koordinasi
4. Tindak Lanjut
5. Pengarsipan

d. Prosedur Usulan Pembuatan Kartu Isteri/Kartu Suami

1. Pengajuan berkas persyaratan oleh pemohon
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan, jika lengkap diproses lebih lanjut
3. Pemeriksaan kelengkapan berkas, jika lengkap diproses lebih lanjut
4. Visitasi lapangan
5. Memproses surat rekomendasi izin operasional lembaga
6. Mengoreksi rekomendasi izin operasional lembaga, menandatangani kolom pengesahan dan disampaikan kepada kepala bidang untuk mendapatkan persetujuan
7. Meneliti berkas dan surat rekomendasi izin operasional, jika setuju ditanda tangani pada kolom pengesahan dan diproses lebih lanjut
8. Menandatangani surat rekomendasi izin operasional
9. Menerima rekomendasi izin operasional lembaga, kemudian menyerahkan ke dpmptsp
10. Pengambilan rekomendasi izin operasional lembaga untuk diproses lebih lanjut

e. Persyaratan

1. Teknis Pelaksana :
 - a. Memenuhi kriteria sesuai ketentuan
 - b. Kelengkapan bahan sesuai prosedur
2. Administrasi :

Mengikuti alur surat sesuai jenjang Jabatan

f. Sarana dan Prasarana

1. Buku Petunjuk
2. Ruang, Meja, Kursi,
3. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
4. Komputer/Printer/Scanner
5. Jaringan Internet
6. ATK,Lemari Arsip, Filling Kabinet

g. Biaya Pemrosesan

Tidak Ada

h. Tempat Pemrosesan Surat/Nota Dinas

Diruang kerja atau tempat lainnya

i. Jadwal Pemrosesan

Sesuai dengan tingkat kebutuhan

j. Penanganan tindak lanjut Pengaduan/Keluhan/ Masukan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Sekretaris Dinas Pendidikan
3. Kepala Bidang PNF dan Kepala Seksi

Ternate, 3 Februari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate

